

MODERASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH PADA PENGARUH SAKD, SIMDA, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anggi*
Yesi Mutia Basri^{† ‡}
Rofika[§]

ABSTRACT

This study aims to examine the influence of the application of the Regional Financial Accounting System, the Regional Information Management System, and the Competency of Human Resources on the Effectiveness of Regional Financial Management with the Internal Control System of the Government as the Variabel Moderating. The population in this research are all employees who work at OPD Siak Regency, selected using a purposive sampling technique. Amount of 92 respondents participated in this study. Data analysis techniques used in this study are multiple regression and moderated regression analysis (MRA). The results of this study conclude: The application of regional financial accounting systems, regional financial management information systems, human resource competence affects the effectiveness of regional financial management. The Government Internal Control System (SPIP) can moderate the implementation of regional financial accounting systems, regional financial management information systems and not for the competence of human resources on the effectiveness of regional financial management.

Keywords: *Financial Accounting System, Information Management System, Competency, Government Internal Control System, Effectiveness of Regional Financial Management*

1. PENDAHULUAN

Dalam hal kewenangan pemerintah daerah sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, pemerintah melaksanakan otonomi daerah dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif, dan bertanggung jawab. Kemudian, diikuti dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang

* *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, anggik190998@gmail.com*

† *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, yesimutia@gmail.com*

‡ *Corresponding Author*

§ *Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, rofika@lecturer.unri.ac.id*

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang kemudian timbul hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang. Karena itulah, diperlukan pengelolaan keuangan negara yang cepat, tepat, dan akurat agar tercapai sasaran yang diinginkan dengan disertai perhatian pada segi-segi efisiensi kehematannya. Laporan keuangan pemerintah yang dihasilkan harus memenuhi prinsip-prinsip tepat waktu dan disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dengan demikian, penting pengelolaan keuangan yang baik dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah.

Pengelolaan keuangan daerah dituntut untuk tertib, efektif, efisiensi, ekonomis, dan juga patuh terhadap semua aturan serta mampu mempertanggungjawabkan pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih adalah adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun laporan keuangan pemerintah daerah. Laporan keuangan tersebut setidaknya-tidaknya berupa laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan yang berkualitas dapat memberikan manfaat dalam upaya mengambil kebijakan suatu pemerintahan pada masa yang akan datang.

Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Riau dengan banyak catatan tentang pengelolaan keuangan. Dari sana terdapat temuan catatan hitam oleh BPK mengenai ketidakpatuhan dalam pengujian kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada pemerintah Kabupaten Siak. Terdapat beberapa kasus ketidaksesuaian pencatatan pada kelebihan pembayaran tunjangan pegawai pada DPMK dan Dinas Pariwisata, perhitungan insentif pemungutan pajak daerah tidak berdasarkan target, dan pembayaran insentif kepada sekretaris daerah tidak tepat, pertanggungjawaban realisasi belanja sewa kegiatan penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tidak didukung bukti pertanggungjawaban yang lengkap, kelebihan pembayaran atas sebelas kegiatan belanja modal pada tujuh OPD, serta beberapa kasus lainnya yang mencerminkan ketidakefisienan pelaporan keuangan serta ketidakpatuhan atas peraturan (BPK

RI.com). Catatan yang diberikan atas suatu laporan keuangan tersebut merupakan cermin terhadap kualitas pengelolaan dan penyajian suatu laporan keuangan sehingga masih terdapat kelemahan yang berhubungan dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Siak.

Penelitian terdahulu banyak mengkaji efektivitas pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah, seperti yang dilakukan peneliti sebelumnya: Saleba (2014), Latifatul (2015), Mei (2017), Pradita (2010), Gunadi (2017), dan Sandria et al (2020). Dari penelitian tersebut ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, di antaranya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD). SAKD bertujuan untuk akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan yang hasil akhirnya adalah informasi keuangan. Perencanaan yang baik didukung oleh informasi yang memadai, maka dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah dapat menunjang efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Pradita, 2010). Berdasarkan hasil penelitian Latifatul (2015) dan Mei (2017), SAKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Irman (2008) yang menyatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh negatif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Selanjutnya, faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah adalah Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan telah mengembangkan sistem aplikasi komputer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat. Sistem tersebut ialah SIMDA, sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik di tingkat pelaporan (SKPKD) maupun di tingkat akuntansi (SKPD). Mengenai perihal ini sudah dibuktikan dalam penelitian berskala internasional yang dilakukan oleh Waweru dan Dominic (2019) di Kenya. Keduanya menemukan bahwa sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Temuannya berbeda dengan

Gunadi (2017) yang menyatakan bahwa sistem informasi manajemen keuangan daerah berpengaruh negatif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi sumber daya manusia juga merupakan faktor yang diyakini memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Menurut Saleba (2014), sumber daya manusia yang kompeten akan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah; begitu pula sebaliknya apabila sumber daya tidak kompeten, efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai. Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas. Nurjannah (2014) menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, hasil ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arsyiati et al. (2016) yang menyatakan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh negatif pada pengelolaan keuangan daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas, terdapat ketidakkonsistenan hasil penelitian sebelumnya mengenai faktor yang memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menarik untuk diteliti kembali agar dapat memperbaiki efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini menggunakan SPIP sebagai variabel yang ikut memengaruhi hubungan antara SAKD, SIMDA, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya SPIP dapat mewujudkan pelaksanaan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Merujuk pada PP No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Internal dirancang untuk memberikan keyakinan dalam mencapai tujuan pemerintah. SPIP meyakinkan tercapainya efektivitas pengelolaan keuangan melalui tercapainya tujuan. Ini juga didukung oleh hasil penelitian Afiah dan Azwari (2015) di pemerintah daerah yang menunjukkan adanya pengaruh positif signifikan antara SPIP dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan kata lain, sistem pengendalian internal akan turut meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian Tanzerina (2016) yang tidak menguji SIMDA dalam memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan daerah. SIMDA dapat mendorong aktivitas pemerintah. Penelitian sebelumnya masih

sangat terbatas membahas pengaruh SIMDA terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Oleh Sebab itu, penelitian ini masih menarik untuk dilakukan.

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh SAKD, SIMDA, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dan menguji moderasi pengendalian internal pemerintah terhadap hubungan SAKD, SIMDA, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

2. TINJAUAN LITERATUR

Teori Stewardship

Teori *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian akuntansi sektor publik, seperti pemerintahan. Hal ini berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan informasi terhadap hubungan antara *steward* sebagai pengelola dan *principal* sebagai pemilik uang. Pengelolaan teori *stewardship* ini difokuskan pada harmonisasi antara *principal* dan *steward* dalam mencapai tujuan bersama. Menurut Donaldson dan Davis (1991), teori *stewardship* adalah teori yang menggambarkan situasi bagaimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu, tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Hal ini memperlihatkan bahwa teori ini mempunyai dasar psikologi dan sosiologi yang telah dirancang, yaitu para eksekutif sebagai *steward* termotivasi untuk bertindak sesuai dengan keinginan *principal*. Selain itu, perilaku *steward* tidak akan meninggalkan organisasinya sebab *steward* berusaha mencapai sasaran organisasinya. Teori ini didesain bagi para peneliti untuk menguji situasi para eksekutif dalam perusahaan sebagai pelayan dapat termotivasi untuk bertindak dengan cara terbaik pada prinsipalnya.

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Menurut Islahuzzaman (2012,p.132), efektivitas adalah kemampuan suatu unit untuk mencapai atau melampaui sasaran, target, atau tujuan yang diinginkan (yang telah ditetapkan lebih dahulu). Menurut Halim (2004,p.74), efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah adalah penyelesaian kegiatan tepat waktu dan

di dalam batas anggaran yang tersedia. Hal ini dapat berarti pula mencapai tujuan dan sasaran seperti yang telah direncanakan. Karena itu, perlu beberapa pendukung dalam mencapai suatu efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada sebuah instansi.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, SAKD adalah serangkaian prosedur, mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Ini menjadi salah satu hal penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan tahapan yang panjang dan sistem yang mengaturnya, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan sistem akuntansi keuangan daerah dengan baik, tujuan akhir, yaitu efektivitasnya pengelolaan keuangan daerah, akan tercapai.

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

SIMDA merupakan salah satu produk penerapan prinsip *e-government* yang mulai muncul. Sistem informasi manajemen ini dikembangkan guna memudahkan kegiatan satuan kerja dalam mengelola keuangan mereka sehingga akhirnya pengelolaan keuangan satuan kerja tersebut lebih efektif, efisien, dan ekonomis. SIMDA keuangan juga berlandaskan pada Permendagri No.55 Tahun 2008. Semakin canggih teknologi, suatu pekerjaan akan lebih ringan dan mudah dilakukan. Hal ini penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan tahapan yang panjang sehingga penggunaan SIMDA akan mendukung pekerjaan karyawan pemerintah dengan lebih cepat. Hal ini membuat karyawan mengelola keuangan lebih teratur. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan SIMDA dengan baik, akan semakin dekat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu efektivitasnya pengelolaan keuangan daerah.

Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia mencakup kapasitas, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya demi mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Mardiasmo, 2009). Kompetensi merupakan dasar seseorang untuk mencapai kinerja tinggi dalam menyelesaikan kerjanya.

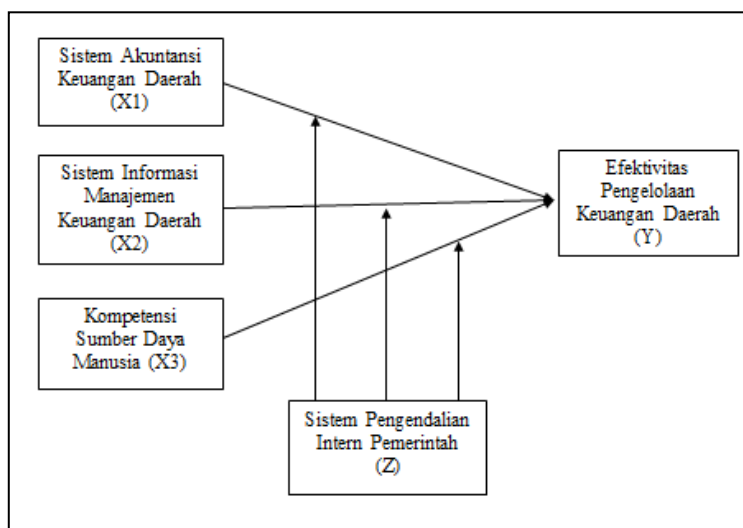
Sumber daya manusia yang tidak memiliki kompetensi tidak akan dapat menyelesaikan pekerjaannya secara efisien, efektif, dan ekonomis. Dalam hal ini pekerjaan yang dihasilkan tidak akan tepat waktu dan terdapat pemborosan waktu serta tenaga. Jika suatu sistem sudah baik diatur, tetapi tidak didukung pemahaman seseorang, yaitu lemahnya kompetensi, pekerjaan yang dilakukan akan sangat lambat dan kinerja pun tidak efektif. Sebaliknya, jika suatu sistem sudah diatur dengan baik, pekerjaan pun akan terlihat lebih mudah dan pengelolaan keuangan daerah akan semakin efektif.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Sistem Pengendalian Internal, menurut Permendagri No. 4 Tahun 2008 Pedoman Pelaksanaan *Review* atas Laporan Keuangan Daerah Pasal 1 (10), adalah “Suatu proses yang dipengaruhi oleh manajemen yang diciptakan untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam penciptaan efektivitas, efisiensi, ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan keandalan penyajian keuangan daerah. Hal ini menjadi salah satu hal penting dalam melakukan pengelolaan keuangan daerah. Untuk mencapai suatu efektivitas pengelolaan keuangan daerah, dibutuhkan tahapan yang panjang dan sistem sebagai pengawas, yaitu SPIP. Apabila dalam pengelolaan keuangan daerah telah diterapkan SPIP dengan baik, tujuan akhir, yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah, akan tercapai.

Model Penelitian

Berdasarkan tinjauan literatur diatas maka model penelitian disajikan pada Gambar 1.



Gambar 1
Model Penelitian

Hipotesis

Hipotesis penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut.

- H₁ :SAKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H₂ :SIMKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H₃ :Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H₄ :SPIP memoderasi hubungan SAKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H₅ :SPIP memoderasi hubungan SIMKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
H₆ :SPIP memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah

3. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Siak yang berjumlah 33 OPD. Pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh

populasi (sensus). Alasan penggunaan sensus karena elemen-elemen populasi relatif sedikit. Jadi, jumlah sampel sebanyak 33 OPD.

Responden penelitian ini adalah pegawai yang melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi atau pengguna anggaran, yaitu kepala dinas masing-masing OPD, kepala bagian keuangan, dan kepala subbagian umum/kepegawaian. Setiap OPD ditetapkan tiga responden sehingga total responden 99 orang.

Jenis dan Sumber Data

Berdasarkan jenis data dominan yang diolah berupa angka-angka, penelitian ini tergolong berkategori kuantitatif (Sekaran, 2007). Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner yang disebarakan kepada sampel dan populasi yang telah ditentukan. Sumber data yang digunakan adalah data primer, yaitu sumber data yang diperoleh langsung dari sumber pertama tanpa ada perantara (Sugiyono, 2012). Data primer berupa jawaban langsung dari kuesioner yang dibagikan kepada kepala dinas masing-masing OPD, yaitu kepala bagian keuangan dan kepala subbagian umum/kepegawaian.

Definisi Operasional

Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y)

Efektivitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu sistem nilai yang digunakan setiap organisasi (lembaga) untuk dapat mengukur keberhasilan (prestasi) suatu kegiatan, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, piñata usaha, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Halim, 2007). Menurut Nurjannah (2014), terdapat lima indikator dalam pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah: tanggung jawab, mampu memenuhi kewajiban keuangan, kejujuran, hasil guna dan kegiatan efisien dan efektif, dan pengendalian. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala likert 1--5, yaitu STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X₁)

Menurut Halim (2012,p.35), akuntansi keuangan daerah adalah “Suatu proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari suatu daerah (provinsi, kabupaten, kota) yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan”. Menurut Permadi (2013), terdapat beberapa indikator pada sistem akuntansi keuangan daerah, di antaranya kesesuaian sistem akuntansi keuangan yang sudah memenuhi SAP, pengidentifikasian, pencatatan, pengklasifikasian, dan pelaporan. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala likert 1--5, yaitu STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (X₂)

Menurut Dewi (2014), SIMKD merupakan sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap, dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya secara lebih komprehensif, yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan, dan akuntabilitas pemerintah daerah. Menurut Widyastuti (2013), terdapat beberapa indikator pada SIMKD, yaitu ketersediaan komputer, tersedianya *software*, dan tersedianya jaringan internet. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala likert 1--5, yaitu STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).

Kompetensi Sumber Daya Manusia (X₃)

Badan Kepegawaian Negara (2003) dalam Sudarmanto (2014) mendefinisikan kompetensi adalah “Kemampuan dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien”. Menurut Tanzerina (2016), terdapat beberapa indikator pada kompetensi

sumber daya manusia, di antaranya pengetahuan, keterampilan, dan perilaku individu.

Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (X₄)

Menurut Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah “Proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Indikator SPIP, di antaranya lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian internal. Masing-masing pertanyaan diukur dengan skala likert 1--5, yaitu STS (sangat tidak setuju), TS (tidak setuju), N (netral), S (setuju), dan SS (sangat setuju).

Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis regresi linier berganda dengan bantuan SPSS 20 (*Statistical Package for Social Science*), dengan persamaan

$$Y = \alpha + \beta_1 \text{SAKD} + \beta_2 \text{SIMDA} + \beta_3 \text{KSDM} + \beta_4 \text{SPIP} + \beta_5 \text{SAKD} + \beta_6 \text{SIMDA} + \beta_7 \text{KSDM} + e$$

Moderated Regression Analysis (MRA)

Untuk menguji variabel moderasi, teknik analisis data yang digunakan adalah MRA, yaitu aplikasi khusus dengan persamaan regresi yang mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen) (Ghozali, 2018). Untuk menguji pengaruh variabel moderasi, didapatkan persamaan

$$Y = a + \beta_1 X + e \quad (1)$$

$$Y = a + \beta_1 X + \beta_2 Z + e \quad (2)$$

$$Y = a + \beta_1 X + \beta_2 Z + \beta_3 X * Z + e \quad (3)$$

Pengujian Hipotesis

Pengujian ini menunjukkan seberapa jauh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2018). Apabila t hitung yang diperoleh lebih besar daripada t tabel, hal itu berarti t hitung signifikan, atau hipotesis dapat diterima. Sebaliknya, apabila t hitung yang diperoleh lebih kecil daripada t tabel, t hitung tidak signifikan atau hipotesis ditolak. Signifikansi yang digunakan adalah 5%, artinya jika nilai $t > 0,05$, hipotesis ditolak; apabila $t < 0,05$, hipotesis diterima (Ghozali, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Data Penelitian

Responden penelitian ini adalah seluruh OPD di Kabupaten Siak yang terdiri atas kepala dinas, kepala tata usaha, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran. Jumlah total penyebaran sebanyak 99 kuesioner pada OPD di Kabupaten Siak. Perincian kuesioner yang disebarakan disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Distribusi Sebaran Kuesioner

Keterangan	Jumlah	Presentase
Jumlah kuesioner yang disebar	99	100%
Jumlah kuesioner yang kembali	92	92,92%
Jumlah kuesioner yang tidak kembali	7	7,07%
Jumlah kuesioner yang dapat diolah	92	92,92%

Sumber : Data Primer, 2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pegawai di OPD Kabupaten Siak terhadap suatu penelitian cukup baik. Hal itu ditunjukkan dengan tingkat pengembalian kuesioner sebesar 92,92%. Dari kuesioner yang dapat diolah dan digunakan sebagai pengujian hipotesis, diketahui karakteristik responden seperti ditunjukkan pada Tabel 2.

Tabel 2
Karakteristik Responden

Keterangan	Jumlah	Prosentase
Jenis Kelamin:		
➤ Laki-laki	21	22,82%
➤ Perempuan	71	77,17%

Usia:		
➤ 22-29	21	22,82%
➤ 30-37	31	33,70%
➤ 38-45	26	28,26%
➤ 46-53	14	15,21%
Pendidikan terakhir:		
➤ D3	37	40,21%
➤ S1	55	59,78%
Jabatan saat ini:		
➤ Kepala Dinas	23	25%
➤ Kepala Tata Usaha	23	25%
➤ Bendahara Penerimaan	23	25%
➤ Bendahara Pengeluaran	23	25%

Sumber : Data Primer, 2020

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa responden didominasi oleh jenis kelamin wanita sebanyak 71 responden (77,17%), sedangkan sisanya pria sebanyak 21 responden (22,82%). Hal ini menunjukkan bahwa komposisi pegawai wanita lebih banyak menjadi aparatur OPD di Kabupaten Siak. Usia responden yang paling banyak berkisar 30--37 tahun dengan persentase sebesar 33,70%, sedangkan paling sedikit berusia 46--53 tahun sebesar 15,21%. Tingkat pendidikan responden yang paling banyak adalah lulusan S-1, yaitu 55 responden (57,78%), disusul lulusan D-3 sebanyak 37 responden (40,21%). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata responden memiliki pendidikan tinggi karena didominasi oleh lulusan S-1.

Statistik Deskriptif

Tabel 3 memperlihatkan hasil statistik deskriptif penelitian ini.

Tabel 3
Hasil Pengujian Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
SAKD	92	1	5	3.71	1.013
SIM	92	1	5	3.88	1.112
KSDM	92	1	5	3.55	1.136
SPIP	92	1	5	3.68	1.067
EPK	92	1	5	3.61	1.204
Valid N (listwise)	92				

Sumber : Data dari output SPSS (2019)

Berdasarkan output SPSS pada Tabel 3, rata-rata berada di sekitar 3 dan nilai standar deviasi tidak melebihi *mean*, artinya kecenderungan data normal.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut.

Tabel 4
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
SAKD,SIM,KSDM,EPK	.906 ^a	.821	.813	2.953
SAKD,SPIP,EPK	.878 ^a	.770	.762	3.326
SIM, SPIP, EPK	.905 ^a	.818	.812	2.958
KSDM, SPIP,EPK	.891 ^a	.795	.788	3.145

a. Predictors: (Constant), SAKD,SIM,KSDM,SPIP
b. Dependent Variable: EPK

Sumber : Data dari output SPSS (2019)

Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai *R Square* pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 0,821; dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa efektivitas pengelolaan keuangan daerah dapat dijelaskan oleh sistem akuntansi keuangan daerah, sistem informasi manajemen dan kompetensi sumber daya manusia sebesar 82,1 %, sedangkan sisanya 17,9 % dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

Pengaruh interaksi sistem akuntansi keuangan daerah dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,770. Untuk pengaruh sistem informasi manajemen dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah ditunjukkan oleh nilai *R Square* sebesar 0,818. Adapun pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah menunjukkan nilai *R Square* sebesar 0,795.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Hasil pengujian hipotesis 1- 4 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5
Hasil Analilis Regresi Liner Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
SAKD	.368	.100	.356	3.729	.007
SIM	.218	.094	.234	2.317	.023
KSDM	.416	.105	.386	3.970	.000

Dependent Variable : EPK (Y)

Sumber : Data dari output SPSS (2019).

Hipotesis 1: Pengaruh SAKD terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis pertama pada Tabel 5 menunjukkan nilai *p value* 0,007 < 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Pengaruh penerapan SAKD menghasilkan keputusan menerima hipotesis pertama. Hal ini menunjukkan SAKD dapat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. SAKD memiliki interaksi yang positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi sistem akuntansi keuangan daerah, hal itu akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud dalam Permendagri No.13 Tahun 2006 meliputi serangkaian prosedur, dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Hal ini sejalan dengan penelitian Pradita (2010) yang mendapatkan hasil SAKD berpengaruh positif dan signifikan pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik.

Hipotesis 2: Pengaruh SIMK terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengujian hipotesis kedua menunjukkan nilai *p value* 0,023 < 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis kedua diterima. Hal ini menunjukkan sistem informasi manajemen keuangan (SIMK) dapat berpengaruh pada efektivitas

pengelolaan keuangan daerah. SIMK memiliki interaksi yang positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan sistem informasi manajemen yang tepat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Dengan memanfaatkan teknologi, baik individu maupun organisasi, berbagai aktivitas dengan lebih efektif dan efisien dijalankan. Teknologi juga sebagai alat bantu pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel sehingga dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian Waweru dan Ngaba (2019) yang menyatakan bahwa SIMKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan.

Hipotesis 3: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Dari hasil pengujian hipotesis ketiga diperoleh nilai *p value* sebesar. $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis ketiga diterima. Hal ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia dapat berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Kompetensi sumber daya manusia memiliki interaksi yang positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sumber daya manusia yang kompeten dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan. Kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu instansi. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Saleba (2014) yang menyatakan bahwa sumber daya manusia yang kompeten akan mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Begitu pula sebaliknya apabila sumber daya tidak kompeten, pencapaian efektivitas pengelolaan keuangan daerah tidak tercapai. Hal ini didukung oleh pengetahuan, perilaku, dan kemampuan individu dalam melaksanakan tugas.

Hipotesis 4: Pengaruh SAKD terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemoderasi SPIP

Untuk pengujian hipotesis moderasi, digunakan teknik analisis MRA. Berikut hasil pengujian hipotesis.

Tabel 6
Hasil Pengujian MRA Hipotesis Keempat

	<i>Unstandardized</i>		<i>Standardized</i>	t	sig
	<i>Coefficients</i>		<i>Coefficients</i>		
	B	<i>Std. Error</i>	Beta		
Hasil dari Langkah1					
(Constant)	2.928	1.997		1.466	.146
SAKD (X4)	1.398	.105	.814	13.2772	.000
Hasil dari Langkah2					
(Constant)	-.254	1.785		-.142	.887
SAKD (X4)	.7742	.143	.432	5.193	.000
SPIP(Z1)	.522	.088	.491	5.906	.000
Hasil dari Langkah3					
(Constant)	13.17	6.251		2.107	.038
	3				
SAKD (X4)	-.189	.439	-.110	-.431	.668
SPIP (Z1)	.032	.235	0.031	.138	.891
X4 * Z1	.032	.014	0.952	2.2377	.028

a. *Dependent Variable* : EPK (Y)

Sumber : Data dari output SPSS (2019).

Hasil pengujian hipotesis keempat, yaitu pengaruh moderasi SPIP terhadap hubungan SAKD dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah (X4*Z1), memiliki nilai *p value* $0,028 < 0,05$, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat diterima, artinya SPIP dapat memoderasi SAKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dengan membandingkan ketiga persamaan regresi, diperoleh informasi bahwa $B2 \neq 0$ (signifikan) dan $B3 \neq 0$ (signifikan), maka dapat disimpulkan bahwa variabel SPIP sebagai variabel *quasi moderator*. Menurut Solimun (2011), *quasi moderator* merupakan jenis variabel moderasi yang diidentifikasi melalui koefisien B2 dan B3 dalam persamaan, yaitu jika koefisien B2 dan B3 dinyatakan signifikan secara statistika. *Quasi moderator* dapat sekaligus menjadi variabel independen. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa variabel SPIP sebagai

variabel moderasi dapat memoderasi hubungan antara SAKD dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Namun, variabel SPIP dapat juga dijadikan variabel independen untuk memengaruhi langsung variabel dependen, yaitu efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pemerintahan, sistem pengendalian internal sangat diperlukan agar terhindar dari kecurangan dan penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. Jika pengendalian internal tersebut terimplementasikan dengan efisien dan efektif, pelaporan keuangan yang dihasilkan andal, aset milik negara tetap aman dan peraturan perundang-undangan dijalankan, akan tercipta tata kelola pemerintahan yang baik. Pengendalian internal pemerintahan sebagai variabel *moderating* dapat memperkuat atau memperlemah hubungan antara sistem akuntansi keuangan daerah dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik penerapan SAKD, efektivitas pengelolaan keuangan daerah semakin baik; sebaliknya, SAKD yang buruk mengakibatkan efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan buruk. Berdasarkan penelitian Saleba (2014), SPIP berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Hal yang sama juga dilakukan oleh Simanungkalit (2013), yang menemukan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Hipotesis 5: Pengaruh Sistem Informasi Manajemen terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemoderasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Untuk pengujian hipotesis 5 dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Hasil Pengujian MRA Hipotesis Kelima

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	sig
	B	Std. Error	Beta		
Hasil dari Langkah1					
(Constant)	4.300	1.664		2.584	.011
SIMDA (X5)	.790	0.052	.848	15.151	.000
Hasil dari Langkah2					
(Constant)	1.195	1.642		.728	.469

SIMDA (X5)	.482	.081	.518	5.95	.000
SPIP(Z1)	.430	.092	.405	4.656	.000
Hasil dari Langkah3					
(Constant)	19.849	4.271		4.647	.000
SIMDA (X5)	-.328	.189	-.352	-1.739	.086
SPIP (Z1)	-.284	.175	-.267	-1.627	.107
X5 * Z1	.029	.006	1.485	4.655	.000
a. <i>Dependent Variable</i> : EPK (Y)					

Sumber : Data dari output SPSS (2019).

Dari hasil pengujian hipotesis kelima, yaitu moderasi SPIP dengan SIMDA (X5*Z), diperoleh nilai *p value* $0,000 < 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis kelima dapat diterima. SPIP dapat memoderasi sistem informasi manajemen terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa SPIP juga merupakan kuasi moderasi. SPIP dapat memengaruhi tata cara mereka bekerja; SPIP dapat memoderasi hubungan SIMKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Apabila sistem pengendalian internal di dalam organisasi baik, pegawai akan melakukan tugasnya dengan memanfaatkan teknologi yang ada dengan sistem yang telah diterapkan oleh organisasi tersebut. Sebaliknya, apabila SPIP yang ada di dalam organisasi tersebut tidak berjalan dengan baik, hal itu akan memperlemah hubungan sistem informasi manajemen terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Waweru dan Ngaba (2019). Keduanya menyatakan bahwa SPIP dapat memoderasi pengaruh sistem informasi manajemen terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem informasi manajemen dan SPIP merupakan hal penting di dalam organisasi demi tercapainya tujuan organisasi dalam mengelola keuangan. SIMDA yang tepat akan meningkatkan efektivitas pengelolaan keuangan yang ada dan apabila pemanfaatan teknologi tersebut dimanfaatkan dengan baik, pengelolaan keuangan akan efektif dan akan menjadi lebih efektif apabila SPIP di suatu organisasi tersebut berjalan sesuai dengan unsur-unsur SPIP tersebut, dan *principal* akan merasa puas karena pengelolaan keuangan telah efektif. Dengan demikian, tujuan organisasi akan tercapai secara maksimal.

Hipotesis 6: Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah Pemoderasi SPIP

Hasil pengujian hipotesis keenam dapat dilihat pada Tabel 8. Dari moderasi SPIP pada hubungan kompetensi sumber daya manusia dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah ($X6*Z1$), diperoleh nilai *p value* $0,000 > 0,05$, maka dapat disimpulkan hipotesis keenam dapat diterima. Hal ini menunjukkan SPIP dapat memoderasi hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam hal ini SPIP juga merupakan variabel kuasi moderasi.

Tabel 8
Hasil Pengujian MRA Hipotesis Keenam

	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	T	sig
	B	Std. Error	Beta		
Hasil dari Langkah1					
(Constant)	2.088	1.644		1.270	.207
KSDM (X6)	.937	.056	.869	16.665	.000
Hasil dari Langkah2					
(Constant)	.176	1.608		0.11	0.913
KSDM (X6)	.635	.094	.589	6.742	.000
SPIP(Z1)	.359	.093	.337	3.866	.000
Hasil dari Langkah3					
(Constant)	8.702	6.626		1.313	.192
KSDM (X6)	.230	.320	.213	.718	.474
SPIP (Z1)	.087	.225	.082	1.387	.700
X6 * Z1	0.13	.010	.608	2.326	.000

a. *Dependent Variable* : EPK (Y)

Sumber : Data dari output SPSS (2019).

Apabila SPIP dilaksanakan, keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi, serta kepatuhan terhadap perundang-undangan bisa tercapai sehingga pengelolaan keuangan akan terlaksana secara efektif. Maka, pegawai yang memiliki kompetensi dengan pengawasan juga akan termotivasi dalam bekerja sehingga memiliki hasil akhir yang bagus, yaitu efektivitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Pada dasarnya, SPIP dapat memperkuat hubungan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Ini disebabkan proses dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang baik

sehingga tercapai efektivitas kemampuan ataupun kecerdasan dari pegawai untuk melaksanakan tahapan dari perencanaan hingga hasil akhir. Dengan demikian, tahap demi tahap akan membutuhkan intelektual berpikir. Hal ini merupakan dasar kompetensi pegawai dalam bekerja. Semakin baik SPIP yang diterapkan dalam sebuah instansi, pegawai yang kompeten akan semakin terarah dalam melaksanakan pekerjaannya yang diimbangi dengan kompetensi yang dimiliki. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri, Inapty, dan Martiningsih (2015) yang menyatakan bahwa pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah dapat memoderasi hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

5. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, dapat ditarik simpulan berikut.

1. Penerapan SAKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak.
2. SIMKD berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
4. SPIP memoderasi pengaruh penerapan SAKD pada efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Sistem pengendalian internal dapat meningkatkan penerapan SAKD sehingga berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.
5. SPIP memoderasi pengaruh SIMKD terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dengan berjalannya sistem pengendalian internal, hal itu dapat meningkatkan penerapan sistem informasi manajemen sehingga berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

6. SPIP memoderasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Adanya sistem pengendalian internal dapat meningkatkan kompetensi SDM sehingga berdampak pada peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran berikut. Pihak pemerintah diharapkan terus mengoptimalkan penerapan SAKD, SIMKD, dan kompetensi sumber daya manusia sehingga pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan dengan efektif. Selain itu, penelitian ini juga dapat mendorong pemerintah daerah agar lebih berkomitmen dalam penerapan SPIP dengan menyusun prosedur-prosedur yang telah diterapkan menjadi sebuah pedoman/kebijakan sehingga dapat menjadi acuan dalam penerapan SPIP di lingkungan pemerintah daerah. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat meneliti selain di OPD Kabupaten Siak dengan menggunakan responden yang lebih luas lagi jangkauannya terhadap efektivitas pengelolaan keuangan. Selain itu, diharapkan penelitian selanjutnya sebaiknya menambah variabel independen lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat dikembangkan dengan menambah variabel lain yang dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan keuangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achmad, T. (2012). Dewan komisaris dan transparansi: Teori keagenan atau teori stewardship. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, 16(1).
- Agoes, S.(2012). *Auditing: Petunjuk praktis pemeriksaan akuntan oleh akuntan publik*. Jilid 1,Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Anton, F.X.(2010). Menuju teori stewardship management. *Majalah Ilmiah Informatika*, 1. Semarang: Fakultas Ekonomi, Universitas AKI.
- Arsyiati, D. & Muslim (2016). *Pengaruh kualitas sumber daya manusia dalam peengelolaan keuangan terhadap pertanggungjaaban keuangan PNPB dalam upaya meningkatkan kinerja instansi pada Universitas Syiahkuala*.
- Bastian, I. (2006). *Sistem akuntansi sektor publik*. Jakarta: Salemba Empat.

- Darise, N. (2008). *Akuntansi keuangan daerah (Akuntansi sektor publik)*. Jakarta: Indeks.
- Darise, N. (2009). *Pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan BLU*. Jakarta: Indeks.
- Darwanis, M. (2009). Pengaruh kapasitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian intern akuntansi terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 2(2), 133-151.
- Fadilah, M. 2013. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia pengelola keuangan dan pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.
Gagasanriau.com.
- Ghozali, I. & Latan, H. (2018). *Partial least squares : Konsep, teknik dan aplikasi menggunakan program smartPLS3.0*. Edisi kedua. Semarang: Universitas Diponegoro,.
- Halim, A. (2004). *Akuntansi keuangan daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A.(2007).*Manajemen keuangan daerah*. Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP YPKN.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen keuangan daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. (2007). *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.55 Tahun 2008 tentang Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya.
- Peraturan Pemerintah No. 23. Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil.
- Permadi, A. D. (2013). *Pengaruh penerapan sistem akuntansi pemerintah daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi kasus pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)*. Skripsi.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah No. 60. Tahun 2008. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Republik Indonesia.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.
- Saleba, S. N. (2014). *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi pada 6 dinas di Kabupaten Baubau, Makasar)*. Skripsi Universitas Hasanuddin.

- Sandria, M., Agusti, R., & Putra, A. A. (2020). Determinan efektivitas pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD): Dimoderasi sistem pengendalian intern pemerintah. *CURRENT: Jurnal Kajian Akuntansi dan Bisnis Terkini*, 1(2), 266-286. <https://doi.org/10.31258/jc.1.2.266-286>
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017), *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian*. Edisi 6, Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, U. & Bougie, R. (2017). *Metode penelitian untuk bisnis: Pendekatan pengembangan-keahlian*. Edisi 6, Buku 1, Cetakan Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Simatupang, M.S. (2017). *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah, sistem akuntansi keuangan daerah, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah*.
- Sugiyono (2015). *Metode penelitian kombinasi (mix methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Suprayogi, A. (2010). *Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah (Studi pada dinas pendapatan dan pengelolaan keuangan Kabupaten Bandung)*. Skripsi. Universitas Pasundan.
- Supriyanto, A. (2005). *Pengantar teknologi informasi*. Edisi Pertama. Jakarta: Salemba Empat.
- Sutrisno, E. (2009). *Manajemen sumber daya manusia*. Jakarta: Kencana.
- Tanzerina, D. (2016). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan sistem akuntansi keuangan daerah (SAKD) terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah dengan pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderating (studi empiris pada satuan kerja perangkat daerah Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau tahun 2015). *JOM Fekon*, 4(1), Fakultas Ekonomi, Universitas Riau, Pekanbaru.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-Undang.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Waweru, S.M. & Ngaba, D. (2019). The effectiveness of integrated financial management information system in selected government ministries in Kenya. *International Journal of Current Aspects*, 3(V), 1-11.
- Yaswat, L. (2015). *Pengaruh kompetensi sumber daya manusia (SDM) sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) dan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah*.